

# DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DESA PINAMORONGAN KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

TESALONIKA V. RARANTA

FLORENCE D. J LENGKONG

VERY Y. LONDA

[tesalonikararanta@gmail.com](mailto:tesalonikararanta@gmail.com)

## ABSTRACT :

*The central government allocates Village funds to support the development in Pinamorongan Village, Tareran District, South Minahasa Regency. However, in the course of the Village Fund, there are still indications of problems related to what is generated, the lack of development from the non-physical side to improve the welfare of the community and in improving the quality of life in the Village. This research uses a qualitative approach. Data obtained from interviews, observations and documents. Data analysis was performed through data reduction, data display, conclusion drawing. The findings of this study are that the development carried out by the Village Government sourced from Village funds in the Pinamorongan Village of the Tareran District has a positive and negative impact on the economic, social and environmental fields. The Pinamorongan Village Government should first determine and consider the goals and focus of the development that will be carried out and provide opportunities for people who are able to be involved in the development project as well as the ongoing maintenance of the facilities and infrastructure that has been built as well as replanting trees in the Watuleley tourist site. .*

*Keywords: Impact of Policies, Village Development, Village Funds*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan Desa dan Kota semakin seimbang dan serasi sejalan dengan program pemerintah yaitu Nawacita salah satu intisari dari program tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan, sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa

Sebelum kebijakan dana Desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD muncul

sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa Solekhan (2014). Dengan demikian, kebijakan dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan dana Desa telah diimplementasikan sejak tahun anggaran 2015, hingga 2019 pemerintah telah mengalokasikan pagu Dana Desa bersumber dari APBN sebesar 230,6 Triliun rupiah untuk 74.954 Desa di Indonesia. Pada tahun anggaran 2016 teralokasi di Desa

Pinamorongan sebesar Rp.604.001.000 yang telah direalisasikan pada pembangunan Desa antara lain kegiatan pembangunan jalan ke kebun, pembangunan lampu jalan, pembangunan sarana prasarana kesehatan, di tahun 2017 sebesar Rp.768.422.000 yang telah direalisasikan untuk kegiatan pembangunan Desa perintisan jalan kebun, pemeliharaan rutin drainase, pembuatan talud, dan pembangunan sarana prasarana kesehatan, tahun 2018 sebesar Rp.702.320.000 adapun pelaksanaan pembangunan di Desa Pinamorongan yang teralisasi pembangunan jalan paving block, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan jalan telford, pembangunan talud, pembuatan patok nama jalan/lorong, tahun 2019 sebesar Rp.795.970.000 yang teralisasi pada bidang pembangunan pembuatan plad deker & drainase, pembuatan jalan rapat beton aspal, pembangunan talud penahan tanah watuleley dan pembangunan peningkatan sarpras wisata watuleley, setiap tahunnya Dana Desa di Desa Pinamorongan diprioritaskan pada pembangunan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pusat mengalokasi dana Desa untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan besaran dana Desa yang diberikan penggunaan dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa. Akan tetapi dalam perjalanannya dana Desa, masih terlihat indikasi masalah yang terkait dengan apa yang di hasilkan, kurangnya pembangunan dari sisi non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam peningkatan kualitas hidup yang ada di desa. Pembangunan yang telah di lakukan oleh pemerintah Desa dalam halnya pembangunan infrastruktur menimbulkan kecemburuan sosial yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat juga masyarakat dan pemerintah , dalam pembangunan tempat wisata watuleley (pohon beringin) belum memberikan pengaruh dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat tetapi lebih kepada

memperindah lingkungan, dan dengan adanya pembangunan objek wisata pohon beringin tidak sebesar dahulu dikarenakan adanya penebangan pohon untuk pembangunan sarana prasarana yang ada disekitaran watuleley dan juga membuat lingkungan yang ada di sekitar tempat wisata watuleley menjadi gersang tidak seperti sebelum ada pembangunan fisik .

Bertolak dari beberapa indikasi permasalahan tersebut terdorong untuk melakukan penelitian sejauh mana dampak Pembangunan melalui dana desa di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran . Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Pembangunan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran (Studi penggunaan Dana Desa)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak kebijakan pembangunan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, dalam kajian Ilmu Administrasi Publik. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Desa, khususnya penggunaan dana desa sehingga mampu memberikan kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat Desa.

Dampak kebijakan (*policy impact atau policy concequencies*) merupakan salah satu aspek atau tipe dari evaluasi kebijakan publik; seperti dikatakan oleh Michael Borus dalam Kusumanegara (2010) bahwa ada tiga tipe evaluasi kebijakan publik, yaitu :

1. Evaluasi Program.
2. Evaluasi Dampak.
3. Analisis Strategis

Dampak menurut Samodra Wibawa (1994) yaitu memberikan perhatian yang lebih besar kepada hasil (*output*) dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Ini dijelaskan, ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak

yang diharapkan maksudnya adalah ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Dampak kebijakan menurut Wibawa terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan antara lain, dampak terhadap individu ini dapat menyentuh aspek-aspek sebagai berikut :

1. Dampak psikis
2. Dampak lingkungan
3. Dampak ekonomi
4. Dampak sosial

Dari uraian diatas jelas bahwa dampak kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam evaluasi atau penilaian kebijakan/program publik guna mengetahui akibat - akibat atau konsekuensi dari dilaksanakannya

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian sumber data di kumpulkan melalui data Primer dan Sekunder. Fokus penelitian ini menggunakan teori dampak kebijakan dari Wibawa (1994), Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan mengambil 11 informan yaitu 4 perangkat Desa Pinamorongan, Mantan Hukum Tua periode 2013-2019, serta 7 masyarakat Desa dengan teknik analisis yang digunakan mereduksi data, penyajian dan terakhir penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menekankan pada 3 dimensi dampak kebijakan dari Wibawa (1994) yaitu:

1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial
3. Dampak Lingkungan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan pengertian bahwa dana Desa salah satunya digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa. Dan di prioritaskan untuk (1) Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; (3) Diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian konseptual bahwa Dampak Kebijakan (*policy impact/policy consequences*) adalah keseluruhan efek yang di timbulkan oleh suatu kebijakan baik yang positif maupun negative, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, untuk selanjutnya menjadi umpan balik atau masukan dari proses perumusan kebijakan berikutnya. Menurut Kusumanegara (2010) Dampak kebijakan merupakan salah satu aspek atau tipe dari evaluasi kebijakan publik.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Pinamorongan yang bersumber dari dana Desa memberikan dampak positif maupun dampak negative, menurut Wibawa S (1994) terdapat dimensi dampak kebijakan terhadap individual yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungan. Pendapat yang sama dari peneliti Mulyanto (2009) dalam tinjauan studinya ketiga bidang tersebut dipercaya mampu menjadi

penggerak dan pendorong keberhasilan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak ekonomi dengan adanya pembangunan jalan akses dari rumah ke kebun mempermudah aktivitas para petani untuk berkebun dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat, dan mendorong masyarakat untuk rajin berkebun sehingga meningkatnya hasil-hasil pertanian dan munculnya usaha-usaha baru bukan hanya dari hasil pertanian tetapi juga ada yang berternak hewan di kebun untuk peningkatan ekonomi, sesuai dengan pendapat dari Graza (2006) dimana pembangunan memiliki tujuan yaitu mempengaruhi perubahan dalam masyarakat persepsi tentang peningkatan taraf hidup. Dan juga dengan adanya pembangunan jalan ke kebun biaya produksi pertanian menjadi berkurang yang dulunya ada biaya tambahan bagi petani untuk memakai jasa roda sapi mengangkut hasil pertanian ke rumah, sekarang hasil-hasil pertanian bisa langsung dengan di angkut menggunakan kendaraan pribadi langsung ke tempat penjual. Hasil yang sama yang dilakukan penelitian oleh Tangkumahat, Panelewen, dan Mirah (2017) dengan adanya pembangunan yang bersumber dari Dana Desa dapat membantu penyediaan fasilitas dan sarana bagi masyarakat pedesaan sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari proyek-proyek pembangunan PKT (padat karya tunai) munculnya sumber pendapatan baru dan menambah penghasilan dari beberapa masyarakat, Melalui program PKT ini masyarakat Desa mempunyai penghasilan tambahan sebagai tenaga kerja dari proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di Desa. Sesuai dengan tujuan dari PKT sendiri dalam SKB 4 Menteri yang merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, yang membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Seperti pada penelitian Muslihah, Siregar H, dan Sriniyati (2019) Pembangunan sarana prasarana, fasilitas, dan

infrastruktur Desa yang bersumber dari dana Desa juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan lewat pemberdayaan masyarakat.

Berbagai pembangunan yang dilakukan salah satunya pembangunan Tempat Wisata Situs Budaya Watuleley tetapi belum memberikan hasil untuk peningkatan pendapatan asli Desa (PAD). Dari pembangunan yang dilakukan di Desa Pinamorong yang bersumber dari Dana Desa kurang lebih sebesar 240.403.500 di tahun 2019 yang bertujuan menjadikan Desa yang mandiri mempunyai pendapatan sendiri, tetapi untuk dampak belum dirasakan saat ini karena belum adanya pembangunan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang fasilitas-fasilitas yang ada ditempat wisata. Seperti halnya dampak kebijakan dari sebuah pembangunan menurut Thomas Dye (2016) ada dampak kebijakan yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, misalnya dalam peningkatan ekonomi Desa dan pendapatan masyarakat, yang seharusnya menentukan terlebih dahulu sasaran atau kebijakan itu diutamakan dan di fokuskan untuk apa pembangunan itu dilaksanakan. Atau dengan kata lain untuk mengefektifkan setiap kebijakan maka tetap harus memperkirakan apakah kebijakan itu memberi manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya.

Dampak sosial dari penelitian yang telah dilakukan sudah banyak masyarakat luar Desa Pinamorong yang sudah mengetahui desa Pinamorong mempunyai situs yang bersejarah setelah ada pembangunan tempat wisata, masyarakat membagikan dimedia sosial dan juga ada wartawan yang meliput tempat wisata ini dan di muat di media cetak maupun di media sosial. Adanya komunikasi menyampaikan pesan kepada orang lain akan memberikan tanggapan atau tindakan tertentu seperti diutarakan Soekanto S (2005) artinya dari sebuah pembangunan harus adanya komunikasi yang baik memungkinkan terjadinya hubungan-hubungan sosial antara orang perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun perorangan dan kelompok.

Terkikisnya interaksi sosial dari masyarakat petani ke kebun karena biasanya pada waktu yang bersamaan ke kebun kalau untuk sekarang adanya perbedaan waktu, karena para petani sudah bisa menggunakan kendaraan masing-masing yang mempermudah untuk berangkat dari rumah ke kebun. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, Sumaryana, Rusly dan Buchari (2018) yang menyebutkan semakin giatnya kegiatan ekonomi dari masyarakat ditandai dengan berkembangnya sarana prasarana, sedangkan disisi lain mudarnya interaksi sosial dan semangat gotong royong dari masyarakat.

Menurut Almond G dan Powell B (2008) dari sebuah kebijakan ada dampak yang bersifat materi yang merujuk pada hasil-hasil yang nampak yang dapat di rasakan oleh masyarakat, seperti kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan lewat pembangunan yang telah dilaksanakan, melalui proyek-proyek pembangunan munculnya kecemburuan sosial masyarakat mengenai program PKT (padat karya tunai) dikarenakan dari proyek-proyek pembangunan yang ada lebih banyak yang menjadi tenaga kerja yaitu pemerintah Desa dan beberapa masyarakat yang selalu di setiap proyek pembangunan menjadi tenaga kerja. Yang seharusnya Pemerintah Desa memberikan kesempatan pada semua masyarakat Desa yang ingin menjadi tenaga kerja pada proyek-proyek pembangunan yang bersumber pada dana Desa.

Adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada keadaan sekarang atau dapat dirasakan pada masa yang akan datang di kemukakan oleh Thomas Dye (2016), seperti penebangan pohon untuk pembuatan talud dan sarana prasarana di daerah tempat wisata watuleley (pohon beringin) yang berakibat berkurangnya daerah resapan air yang menyebabkan keringnya sumur-sumur yang ada disekitaran daerah tempat wisata di saat musim panas,

yang seharusnya ada penghijauan kembali setelah selesainya dilakukan pembangunan, di sisi lain pembangunan talud penahan tanah berfungsi untuk mencegah dari bahaya tanah longsor. Dari pembangunan untuk menunjang sarana prasarana dari tempat wisata Watuleley ada salah satu pohon yang di tebang sehingga pohon beringin keadaanya tidak sebesar dulu tetapi dampak positif dengan adanya pembangunan tempat wisata situs Budaya watuleley menjadi Icon Desa sehingga Desa pinamorongan menjadi lebih Indah .

Ada juga pembangunan yang berdampak baik untuk lingkungan adalah pembuatan plat deker dan drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air dari permukaan jalan sampai pada pembuangan air sehingga air tidak tersumbat dan mencega kerusakan lingkungan.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan tentang dampak kebijakan pembangunan Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan fokus penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pembangunan jalan akses dari rumah ke kebun mempermudah dan mempersingkat aktivitas masyarakat mendorong masyarakat untuk bertani dan biaya produksi pertanian berkurang sehingga hasil-hasil pertanian dan pendapatan masyarakat bisa meningkat dan munculnya usaha-usaha baru dari hasil pertanian dan peternakan. Juga dengan adanya proyek pembangunan PKT (padat karya tunai) menambah sumber pendapatan baru untuk masyarakat. Akan tetapi ada pembangunan tempat wisata Watuleley yang belum memberikan dampak untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat .
2. Dampak sosial dari pembangunan yaitu, masyarakat luar Desa sudah banyak yang

mengetahui ada situs bersejarah di Desa Pinamorongan. terkikisnya interaksi sosial masyarakat Desa, adanya kecumburuan sosial dari masyarakat dari proyek-proyek pembangunan.

3. Dampak lingkungan dari pembangunan yang bersumber dari dana Desa yaitu adanya penebangan pohon-pohon di tempat wisata watuleley membuat sumur-sumur di sekitaran tempat wisata kekeringan disaat musim panas, dengan adanya pohon beringin yang di tebang membuat keadaan situs budaya Watuleley sudah tidak sebesar seperti dulu. Ada juga dampak positif dari pembangunan tempat wisata yaitu, Desa Pinamorongan terlihat lebih indah karena sudah mempunyai *Icon* Desa. Ada juga pembangunan talud yang memberikan dampak pada lingkungan sebagai penahan tanah untuk mencegah terjadinya longsor dan pembuatan plat deker dan drainase yang mengalirkan air dengan baik.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran untuk pembangunan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran yang bersumber dari Dana Desa, adalah sebagai berikut :

1. Menentukan dan mempertimbangkan terlebih dahulu sasaran dan fokus dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilakukan.
2. Harus adanya pemeliharaan dari pemerintah Desa terhadap pembangunan yang telah dilakukan.
3. Memberikan kesempatan pada masyarakat-masyarakat yang belum pernah terlibat dari proyek pembangunan PKT (padat karya tunai).
4. Menanam kembali pohon di daerah tempat wisata watuleley dan memelihara dengan baik sarana dan prasarana situs budaya Watuleley (pohon beringin).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Garza, R, T. 2006. Community Development in Rural Mexico; The Social Psychological Effects Of Adult Education 1. *Jurnal Of Applied Social Pshychology*, 18 (8)
- Kusumanegara, S. 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yoyakarta: Gava Media.
- Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. *IJIS*, 2 (21)
- Muslihah, S. Siregar, H. Sriniyati. 2019. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(1)
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press.
- Tangkumahat, F. Panelewen, V. Mirah, A.D. P. 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi*, 13 (2A)
- Wibawa, S. Purbokusumo, Y. Pramusinto, A. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.